

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
(SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI



**NURUL ANRIANI
105731119919**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR 2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NURUL ANRIANI
NIM 105731119919**

***★ Untuk memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Serjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ketika ujian sedang menghampiri, tidak perlu bersedih hati. Kebahagiaan dan kesedihan itu silih berganti. Tergantung bagaimana kita menghadapi dan mengambil hikmah dari apa yang terjadi.”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya

Sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta

Orang – orang yang saya sayangi dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

“Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu bagian success storiesnya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini .

Jadi tetap semangat dalam berjuang ya.”



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar.

Nama Mahasiswa : Nurul Anriani

No. Stambuk/NIM : 105731119919

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

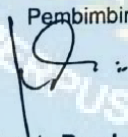
Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 31 Agustus 2023 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 4 September 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Linda Arisanty Razak. SE.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN : 0920067702


Wahyuhi. SE.,M.Ak
NIDN : 0920079201

Mengetahui,



Ketua Program Studi


Mira. SE.,M.Ak.,Ak.
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Nurul Anriani, Nim: 105731119919 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 14 Shaffar 1445 H /31 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Shaffar 1445 H
04 September 2023 M

PANITIA UJIAN

- | | |
|------------------|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag (Rektor Unismuh Makassar) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 3. Sekretaris | : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc. (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |
| 4. Penguji | : 1. Dr. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si., AK.CA 2. Dr. Syamsuddin S.Pd., M.Ak 3. Wahyuni, SE., M.AK 4. Nurhidayah, SE., M.Ak |

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Anriani
 Nomor : 105731119919
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Takalar.

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Shaffar 1445 H
4 September 2023 M

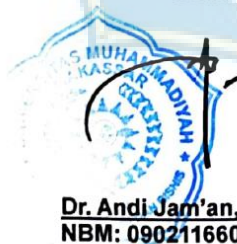


Tanda Tangan Pernyataan,

Nurul Anriani
NIM: 105731119919

Dekan

Ketua Program Studi



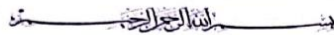
Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Anriani
 Nomor : 105731119919
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Takalar.

Sehingga ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan didepan tim penguji adalah asli hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Shaffar 1445 H
4 September 2023 M



Tanda Tangan dan Stempel

Nurul Anriani
NIM: 105731119919

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 0902116603

Mira, SE., M.Ak., Ak
NBM: 128 6844

ABSTRAK

NURUL ANRIANI 2023. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh Linda Arisanty Razak dan Wahyuni.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Takalar. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis studi kasus. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sudah sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar meskipun adanya masalah yang dialami dalam proses sistem informasi pemerintahnya, dimana seringkali aktivitas dan proses inputan dalam bidang menjadi terhambat yang diakibatkan oleh jaringan yang kurang baik. Namun hal itu tidak mengurangi fungsi dari sistem informasi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kata kunci: *Efektif, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)*



ABSTRACT

vii

NURUL ANRIANI 2023. Analysis of the Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in the Takalar Regency Regional Financial and Revenue Management Agency. Thesis for the Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, guided by Linda Arisanty Razak and Wahyuni.

The purpose of this study is to find out how the Local Government Information System (SIPD) is implemented in Takalar. This research was conducted using case study analysis method. Data collected through interviews, observation, and documentation.

The results of the study show that the use of the Regional Government Information System (SIPD) application has played an important role in decision making at the Takalar Regency Regional Financial and Asset Agency (BKAD) despite the problems experienced in the government information system process, where activities and input processes are often in the field of become obstructed due to poor network. However, this does not reduce the function of government information systems in decision making.

Keywords: *Effective, Local Government Information System (SIPD)*



KATA PENGANTAR

viii



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar”. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada syafaatnya di akhir masa.

Penulis menyadari bahwa peyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak (Muhammad Yusuf), dan Ibu (Suriati) yang telah mengorbankan serta memberikan motivasi, nasehat, semangat dan doa kepada ALLAH SWT sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki dan semoga anakmu ini bisa membahagiakan bapak dan ibu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Dr. Linda Arisanty Razak selaku pembimbing I dan Ibu Wahyuni selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Ibu Mira, S.E.,M.Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar
6. seluruh dosen Akuntansi yang telah memberikan segala ilmu yang dimiliki selama proses pembelajaran di kampus sehingga dapat menjadi pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis kedepannya.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar, Bapak kepala badan dan pegawai BKAD Kabupaten Takalar terimakasih atas segala kerja sama dan bantuan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Sahabat terbaikku Nur Ihfa Syahrir yang selalu siap mendampingi saya mulai dari masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai saat ini yang telah banyak membantu , memberi semangat dan mendengar keluh kesah penulis serta memberi masukan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi langkah kita menuju kesuksesan.
9. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2019, terkhusus jurusan Akuntansi dan teman – teman seperjuangan kelas AK19F terima kasih atas segala do'a dan kebersamaanya selama ini.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kebaikan skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pembaca dan di lingkungan akademis.

Makassar, 4 September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| ABSTRAK..... | iv |
| ABSTRACT..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C.Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D.Manfaat Penelitian..... | 6 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 8 |
| A. Tinjauan Teori..... | 8 |
| B. Penelitian Terdahulu | 17 |
| C. Kerangka Pikir | 20 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 22 |
| A. Jenis Penelitian..... | 22 |
| B. Fokus Penelitian | 22 |
| C. Lokasi Dan Waktu..... | 22 |
| D. Jenis Dan Sumber Data..... | 23 |
| E. Informan..... | 24 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 24 |

| | |
|--|-----------|
| G. Metode Analisis Data..... | 24 |
| BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 27 |
| A. Gambaran Umum..... | 27 |
| B. Hasil Penelitian..... | 32 |
| C. Pembahasan..... | 40 |
| BAB V PENUTUP..... | 46 |
| A. Kesimpulan..... | 46 |
| B. Saran..... | 46 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 48 |
| LAMPIRAN..... | 50 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--------------------------------|----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 17 |
| 2.2 Coding Wawancara | 54 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 21 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi | 29 |
| Gambar 4.2 Aplikasi SIPD..... | 32 |
| Gambar 4.3 Flowchart Aplikasi SIPD..... | 35 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkembang pesat. Otonomi daerah mengubah kebijakan pemerintah pusat menjadi kebijakan daerah di beberapa bidang, termasuk kebijakan pengelolaan ekonomi wilayah. Dalam akuntansi negara, unit pelaporan dan unit akuntansi yang melakukan sistem akuntansi pemerintah kabupaten.

Dalam undang – undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang pemerintah daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintah daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dengan dikeluarkannya undang – undang No 23 Tahun 2014, maka Menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah, seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 sistem informasi pemerintah daerah yang disingkat dengan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya yang saling berhubungan untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, peraturan menteri dalam negeri republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara

perubahan rencana pembangunan panjang daerah, rencana kerja pemerintah daerah, dan lampiran meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk pola kerja sama berbasis data dan informasi. Sehingga dapat membangun database yang ada di daerah yang dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat. (Wurara, *et al* 2020)

Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas melakukan pemantau dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah, kajian dan evaluasi kebijakan dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan berikutnya dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Badan ini memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, badan ini yang bertugas dalam mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut maka badan perencanaan pembangunan daerah menggunakan sistem yang dapat mengoptimalkan kinerjanya agar dapat memberikan kualitas yang baik.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan membenarkan alur langkah-langkah yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan negara

sesuai dengan persyaratan hukum. Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pemegang mandat Pengawas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertanggung jawab untuk mengumpulkan SIPD terkait dengan persyaratan hukum dan aplikasi administratif, sesuai PP No. 60 Tahun 2008. (Alfani and Nasution 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah tersebut mempunyai tujuan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan, sehingga dikembangkannya program aplikasi komputer yang diberi nama SIMAKDA (Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah) yang digunakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2018 . Pada tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar terjadi peralihan dari SIMDA ke SIPD. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 pasal 391 dimana Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah, yang dikelola dalam suatu Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Penggunaan SIPD dipertegas melalui peraturan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (Santriaty, *et al* 2023)

Perbedaan SIMAKDA dengan SIPD yaitu, Implementasi SIMAKDA terkait dengan Permendagri No. 13/2006 BPKP , sedangkan SIPD berdasarkan Permendagri no. 70/2019 dari Kementerian Dalam Negeri. SIMAKDA sudah biasa digunakan Oleh karena itu, adaptasi relatif cepat, termasuk implementasi di lapangan . Itu sebabnya ada yang

berpendapat bahwa pembayaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) lebih cepat. Sedangkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), proses penganggaran dipantau secara elektronik termasuk perubahan Prosesnya melalui administrator sistem dan setiap wilayah memiliki administrator sistemnya sendiri dengan kekuatan yang berbeda. dimana terdapat pengurus Daerah, Manajer perencanaan, juga manajemen keuangan. Pengelola wilayah ditempatkan pada sekretariat daerah yang kemudian membawahi seluruh pengelola, termasuk pengelola di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). SIPD juga lebih rinci dan tidak membedakan keluaran langsung dan keluaran tidak langsung, tetapi secara langsung berdasarkan klaster, seperti belanja barang dan jasa, biaya pegawai, dll .(Santriaty, *et al* 2023)

★ Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar telah menerapkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dan telah berbasis website. Namun sering terjadi kendala / masalah yakni sistem informasi pemerintah daerah belum dapat membackup data dan sistem informasi pemerintah daerah kadangkala tidak optimal atau seringnya terjadi eror apabila terjadi gangguan jaringan. Tentunya hal ini menjadi penghambat bagi aktivitas instansi dalam melaksanakan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi. Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ialah sistem informasi yang memuat perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Sistem informasi pemerintah ini juga berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara nyata dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan

dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional dan efektif. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan pengembangan pada masing – masing instansi pemerintah. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kabupaten Takalar sendiri mempunyai tugas pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di kabupaten Takalar, namun dalam menjalankan program ini tidak mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa masalah yaitu, karena pada tahun sebelumnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar masih memakai SIMAKDA dan itu tidak terdapat kendala dalam pemakaiannya, akan tetapi pada tahun 2022 Kabupaten Takalar telah menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah (SIPD).

Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan, ditambah dengan diterapkannya sistem informasi yang berbasis komputerisasi yang akan mempermudah instansi atau bidang dalam memperoleh informasi. Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) masih belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam pengoperasian aplikasi dan masih menggunakan aplikasi pendamping atau aplikasi yang dapat membantu

dalam pengimputan data yaitu sistem informasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah ialah apakah Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam sistem informasi, pengguna dan kepuasan pemakai efektif diterapkan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam sistem informasi, pengguna dan kepuasan pemakainya telah efektif diterapkan pada BKAD Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru di bidang informasi, terutama yang berkaitan dengan pemahaman mengenai sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang digunakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu gambaran yang lebih baik bagi instansi akan pentingnya penerapan sistem informasi pemerintah daerah dalam menunjang mengimputan data yang efektif. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan apabila seandainya ada hal – hal yang perlu diperbaiki, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan efektif.

b. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan bahan informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintah daerah ataupun terkait dengan aplikasi SIPD.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori.

1. Sistem Informasi

Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen ialah pengertian dari Sistem Informasi. Istilah informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. (Nasution *et al.* 2021)

Sistem informasi ialah sinergi antara teknologi informasi dan penggunaannya, keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya berdasarkan informasi yang dihasilkan tetapi juga dilihat dari ketepatan waktunya. Pengguna atau pemakai dan ketetapan nilai merupakan komponen penting dalam sebuah sistem informasi. (Chandra Pramana *et al.* 2023)

Tujuan dari sistem informasi yaitu menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tetap kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat bermanfaat. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar tersebut tidak dapat dikatakan sebagai sistem informasi yang berguna. (Nasution *et al.* 2021)

2. Sistem Informasi Pemerintah (SIPD)

Terwujudnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diamatkan dalam undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi di sistem informasi pemerintah Daerah. *Good Governance* salah satunya adalah menyangkut transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi wajib melakukan keterbukaan informasi, Tujuan dikelolahnya SIPD adalah agar pengelolaan informasi daerah dapat dilakukan dengan secara profesional seperti yang terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah seperti informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, dapat menyediakan dan mengelola informasi pemerintah daerah lainnya. Adanya tuntutan dalam proses perencanaan pembangunan yang ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, serta keterbukaan informasi publik membuat pemerintah terpacu untuk berinovasi dalam perencanaan pembangunan. Sehingga terbitlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD. (Nasution *et al.* 2021)

Defenisi sistem informasi pemerintah (SIPD) secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan secara bersama – sama saling mendukung mengolah data untuk

menghasilkan suatu produk berupa informasi. Sementara itu SIPD memiliki pengertian sebagai pengelolaan data informasi secara sistematis berdasarkan kinerja yang sesuai dengan azas efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi diseluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. (Chandra Pramana *et al.* 2023)

Sistem informasi pemerintah (SIPD) merupakan suatu bentuk yang dibuat sebagai bentuk teknologi untuk digunakan dan direalisasikan. Sistem informasi pemerintah (SIPD) dirancang oleh kementerian dalam negeri untuk menunjukkan kemajuan tahapan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan syarat peraturan perundang-undangan. Untuk menunjukkan pemerintahan yang baik, pemerintah kabupaten Takalar telah melakukan dan menerapkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) semenjak tahun 2020. (Balqis, Fadhly, and Az 2021)

Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) memiliki pengertian sebagai pengelolaan informasi secara sistematis berbasis kinerja yang konsisten dan prinsip efisien dan efektifitas dalam mencapai tujuan organisasi pada semua tingkatan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik terpadu nasional sangat penting dilakukan dalam arah tata kelola pemerintahan yang sangat baik dan terciptanya data inonesia yang akurat dan terintegrasi dari daerah hingga pusat . oleh karena itu diterbitkan permendagri No 70 Tahun

2019 yang mengatur jenis (SIPD) yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam beberapa kelompok yaitu :

1. Informasi pembangunan daerah

Informasi pembangunan daerah sistem informasi pemerintah daerah mampu mengelola data data dan informasi terkait perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan berbagai faktor yang terkait. Daya saing adalah informasi yang terkandung dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Informasi keuangan daerah

Informasi keuangan daerah sistem informasi pemerintah daerah dapat mengelola data keuangan daerah secara efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah, informasi keuangan daerah lainnya. (Sebastian Kera Monteiro *et al.* 2023)

3. Pengelola Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan / penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Penyusunan APBD berpedoman kepada rencana kerja

pembangunan daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 181 dan undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 17 – 18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama DPRD dengan pemerintah daerah. (Sebastian Kera Monteiro *et al.* 2023)

Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi – transaksi agar dapat ditelusuri dana – dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelanjaan dana. (Defitri 2018)

4. Anggaran Daerah

Anggaran ialah sebuah rencana atau sebuah proyeksi. Disektor pemerintahan anggaran sebuah rencana atau proyeksi atas pendapatan dan belanja dimasa mendatang, sebuah anggaran pemerintah adalah sebuah rencana atas penerimaan dan pengeluaran dana – dana dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah karena proses pembuatan satu anggaran disebut penganggaran, maka penganggaran public didefenisikan atas penerimaan dan pengeluaran dana – dana publik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cermin dari pilihan – pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk melakukan pilihan – pilihan tersebut, pemerintah harus melaksanakan fungsi dimana fungsi tersebut ialah, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsive, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi pendapatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), fungsi kedua dengan sisi pengeluaran belanja. (Puluala 2021)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dalam Pasal 16 mengenai azas umum dan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dinyatakan bahwa fungsi APBD ialah sebagai berikut :

1. Fungsi Otirisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk nilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektifitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti atau memperhatikan keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. (Sebastian Kera Monteiro *et al.* 2023)

5. Pendapatan Daerah

Untuk meningkatkan pendapatan utama daerah, pemerintah daerah harus mengetahui bagaimana cara menyaring secara bermakna apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam pendapatannya dan hal ini akan diatur dalam peraturan daerah. Oleh karena itu, sosialisasi dari pemerintah provinsi diperlukan untuk memastikan pasokan pengetahuan dan pemahaman yang sebesar-

besarnya. Pendapatan awal daerah dan kepentingannya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber yang berada di wilayahnya sendiri dan dipungut secara daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yusmalina, *et al.* 2020)

Mardiasmo (2016:14) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau pemerintah daerah kepada daerah tanpa perimbangan secara langsung, yang dapat dibayar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selain pajak daerah, salah satu sumber pendapatan daerah adalah juga pajak daerah. Menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ganti Rugi Daerah, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah yang dibayarkan untuk pelayanan atau pemberian izin yang diberikan secara tersendiri. atau diberikan oleh pemerintah provinsi untuk kepentingan individu atau masyarakat. Sedangkan menurut Munawiri (2010; 15), balas dendam adalah pembayaran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan digunakan secara langsung. (Pendapatan *et al.* 2020)

Saat ini, kota masih menghadapi banyak masalah terkait upaya peningkatan pendapatan daerah, tetapi kota memiliki sarana dan prasarana yang tidak mendukung investasi, menimbulkan

pertanyaan tentang peran PAD yang sebenarnya dalam belanja modal dan apakah ini disebabkan oleh PAD yang rendah atau tidak sesuai untuk reservasi. Namun tidak semua daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar untuk memenuhi kebutuhan daerah karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Perbedaan ini mengakibatkan ketimpangan sumber pendanaan antar daerah, dimana daerah yang potensial dan kaya sumber daya memiliki sumber pendanaan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah miskin. (Asmawiah *et al.* 2022)

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah salah satu lembaga pemerintah independen di Indonesia dan berkomitmen untuk mengaudit pengelolaan dan pertanggung jawaban dana pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Banyaknya kasus korupsi maupun penyalahgunaan keuangan negara yang telah terjadi dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah di tahun 2017. BPK memegang peranan penting dalam pelaksanaannya Tinjauan pengelolaan keuangan pemerintah dan pertanggungjawaban pelaksanaannya Kepemimpinan yang baik.(Kumoro, *et al.* 2019)

Eksistensi lembaga BPK terkait dengan peran pengawasannya yang dilakukan oleh DPR, sehingga hasil pemeriksaan BPK mesti disampaikan terhadap DPR memantau hal

itu. Pasal 7A UUD 1945 Perubahan Ketiga Tahun 2001, yang mengatur hubungan antara fungsi pengawasan DPR dan BPK, menyatakan MPR dapat memanggil kembali Presiden dan Wakil Presiden selama masa jabatannya. DPR, jika benar bahwa dia melanggar ketentuan dengan makar terhadap negara, korupsi, penyuapan, kejahatan atau tindakan serius lainnya malu atau jika mereka tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, jika hasil berdasarkan hasil Investigasi BPK mengungkap penyelewengan penggunaan uang negara maka DPR bertindak sesuai ketentuan Pasal 7A UUD1945 dan keputusan konstitusi yang diperlukan.(Nasarudin 2020)

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian yang akan datang, digunakan untuk membandingkan hasil penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan didalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Tabel Penelitian Terdahulu

| NO | Nama Peneliti Dan Tahun Peneliti | Judul Penelitian | Metode Penelitian | HASIL PENELITIAN |
|----|---|--|-------------------|--|
| 1 | (Wurara, Kimbal, and Kumayas 2020) <i>Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2 (5), 2020</i> | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Kota Manado. | Kualitatif | hasil penelitian yakni penerapan system informasi pemerintahan daerah yang belum terlaksanakan dengan baik ini karena kurangnya keefisien dalam hal waktu, ini dikarenakan banyaknya SKPD yang tidak dapat memasukan data tepat waktu,sesuai waktu yang ditentukan Bappelitbangda. |
| 2 | (Sebastian Kera Monteiro et al. 2023) <i>Jurnal Increate</i> | Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam |

| | | | | |
|---|---|---|-------------|--|
| | <i>Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi</i> 9 (1), 2023 | Pemerintah Daerah (Sipd) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Sikka | | bidang anggaran di Kabupaten Sikka sudah cukup efektif. |
| 3 | (Chandra Pramana et al. 2023) <i>Jurnal ekonomi bisnis</i> 2023 | Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk | Kuantitatif | Hasil dari penelitian ini adalah SIPD masih memiliki kelemahan atau kendala dalam penerapannya, diantaranya adalah kurang efektif dan efisien, lambat, dan masih perlu didampingi oleh system yang lain. Hasil analisis implementasinya adalah SIPD belum dapat diimplementasikan secara penuh karena masih banyak fitur-fitur yang belum muncul, SIPD juga belum optimal karena belum dapat berdiri sendiri |
| 4 | (Alfani and Nasution 2022) <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i> 6 (1), 4036 – 4043, 2022 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara | Kuantitatif | Hasil dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini SIPD merupakan sistem berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dari segi waktu, SIPD yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut menghasilkan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD ini. Berdasarkan analisis melalui poin-poin kualitas yang termasuk kategori yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, ditemukan bahwa penerapan SIPD sudah efektif. |
| 5 | (Chinda Aqni Adisi and Abdul Sadad 2022) <i>Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial</i> 1 (3) 2022 | Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu | Kuantitatif | Pemerintah Kota Parepare telah siap dalam menerapkan SIPD terhadap penyusunan Anggaran karena didukung oleh beberapa faktor yaitu, Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Kuantitas yang dihasilkan. Namun, masih adanya hambatan /kendala yang terjadi yang disebabkan karena adanya gangguan server. |
| 6 | (Budgeting et al. 2019) <i>Jurnal AK-99</i> 3 (1), 2775 – 6726, 2023 | analisis kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) terhadap penyusunan anggaran di kota parepare | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai dengan sistem akuntansi yang seharusnya yaitu terdapat otorisasi terhadap transaksi yang terjadi dari pihak yang berwenang, terdapat pemisahan fungsi dan mempunyai sistem pengendalian internal yang baik. |

| | | | | |
|----|---|--|------------|---|
| 7 | Evi Lamasari, Dwiyani Sudaryanti, dan Abdul Wahid Mahsuni. <i>Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi</i> 11 (03), 2022 | pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah (studi kasus pemerintah daerah kota malang) | Kualitatif | hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penilaian Kerja Satuan Daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian Kerja Satuan Daerah. |
| 8 | Siska Yulia Defitri. <i>Jurnal Benefita: Ekonomi Pembangunan, Manajemen Bisnis & Akuntansi</i> 3 (1), 64 - 75, 2018 | pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. | Kualitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. |
| 9 | (Vitriana, Agustiawan, and Ahyaruddin 2022) <i>jurnal Digital Business</i> 1 (1), 2963 – 8585, 2022 | Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru | Kualitatif | Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPKAD Kota Pekanbaru belum optimal dan SIPD yang digunakan BPKAD Kota Pekanbaru dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif. |
| 10 | (Novita, Ningsih, and Sari 2023) <i>Jurnal altifani</i> 3 (4) 545 – 552, 2023 | Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep | Kualitatif | Hasil penelitian menjelaskan bahwa sebelum adanya mahasiswa magang di sekretariat daerah kabupaten Sumenep dalam pengisian sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) mengalami keterlambatan saat pengisian SIPD, sehingga dengan adanya mahasiswa magang industri MBKM Prodi S1 Akuntansi Univesitas Trunojoyo Madura di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dapat membantu pegawai sekretariat daerah entry data lebih cepat ke sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sehingga pengisian SIPD dapat selesai tepat waktu. |

Sumber : referensi sebelumnya

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan dengan kerangka pikir dibawah ini dijelaskan bahwa bagaimana sistem informasi pemerintah daerah yang digunakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar, dan cara pengambilan keputusan secara manajemen, selain itu dijelaskan peranan sistem informasi pemerintah daerah yang digunakan oleh Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar.

Sistem informasi ialah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi, sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup untuk dikatakan suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai ialah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna.

Perkembangan sistem informasi badan keuangan dan aset daerah (BKAD) menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk lebih memudahkan dalam mengelola informasi terkait data agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aplikasi SIPD itu sendiri adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) mudah digunakan dalam menyajikan informasi secara komprehensif dan akurat, memberikan gambaran menyeluruh tentang status keamanan data. Hal ini memungkinkan para pegawai untuk mengambil keputusan yang tepat dan informasional dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja.



Gambar 2.2
Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan *case studies*. Pendekatan ini memfokuskan pada studi mendalam terhadap fenomena tertentu dengan tujuan untuk memahami fenomena tersebut secara detail. *Case studies* ialah alat penelitian yang kuat untuk memahami kasus yang kompleks, mendalam, dan unik. Dengan pendekatan yang tepat, wawasan berharga untuk menginformasikan kebijakan, memperbaiki praktek, atau mengembangkan teori baru dalam berbagai bidang studies. (Hadi, Asrori, Rusman 2021)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini di maksudkan untuk membatasi penelitian agar peneliti dapat meneliti data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Pembatasan dalam peneliti kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian ini akan berfokus pada objek utamanya yaitu tentang penerapan sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Takalar.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kabupaten Takalar.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung kurang lebih 2 (dua) bulan yakni dari bulan Juli 2023 sampai September 2023, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan langsung.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama dari kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain - lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari percobaan atau kegiatan lapangan yang dilakukan. Data ini merupakan data asli dan baru pertama kali diperoleh dari informan secara langsung dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini sumber data penelitian diperoleh dari Subbidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar.

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh penulis. Dalam penelitian ini, data sekunder ini diperoleh dari studi pustaka. Sumber data tersebut diambil yang berhubungan dengan judul atau permasalahan yang diteliti, yaitu seperti profil BKAD Kab Takalar, dan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

E. Informan

Informan dipilih sesuai spesifikasi peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti memilih yang untuk diwawancarai yaitu, Bapak Syamsul Kamar sebagai Subbidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dan tatap muka langsung dengan pihak instansi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dibagian Anggaran yang berwenang memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
2. Teknik dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat perusahaan. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah penelitian itu sendiri, dalam penelitian ini perlengkapan yang digunakan adalah daftar wawancara, buku catatan, alat tulis dan alat-alat seperti alat perekam, dan alat pengambilan gambar/ video. (Sukendra and Atmaja 2020)

H. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah. Dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan metode yang mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi sebenarnya dari objek penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus yang dialami oleh objek penelitian secara retrospektif dibandingkan dengan standar yang ada. kemudian di deskripsikan. Jadi teknik analisi data yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

2. *Anticipatory*

Menurut Milles dan Huberman *anticipatory* merupakan teknik analisis data yang melibatkan ekspektasi dan interpretasi peneliti sebelum dan selama proses analisis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi temuan atau pola secara produktif dan meningkatkan kualitas temuan penelitian. *Anticipatory* dilakukan sebelum kegiatan mereduksi data.

3. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemotongan, penyederhanaan dan transformasi data mentah dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan dari awal pengumpulan data sampai dengan meringkas, melacak data, menulis catatan, dan lain-lain dengan tujuan untuk menghilangkan data yang tidak perlu.

4. *Display Data*

Display data adalah deskripsi dari sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Informasi kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga bisa dalam bentuk tabel dan diagram.

5. Verifikasi dan Penegasan kesimpulan.

Verifikasi dan Penegasan kesimpulan ialah kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar umum objek penelitian

1. Sejarah umum BKAD

Badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar terbentuk pada tahun 2017. Badan pengelolaan keuangan daerah sebelumnya merupakan bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten Takalar yang tergabung dengan dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar dalam dinas pengelolaan keuangan daerah. Dinas pendapatan daerah kabupaten Takalar yang mempunyai tupoksi di sektor pendapatan dan bagian keuangan sekretariat daerah kabupaten Takalar yang mempunyai tupoksi di bidang pembelanjaan/pencairan anggaran dan penyusunan anggaran pemetintah daerah kabupaten Takalar.

Latar belakang terbentuknya pengelolaan keuangan daerah kabupaten Takalar yaitu berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan peraturan kabupaten Takalar No 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Takalar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan bupati kabupaten Takalar tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan struktural pada badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Takalar.

Badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten Takalar secara administratif berkedudukan di kecamatan patallasang. Kabupaten Takalar sebagai daerah yang cukup potensial sangat beralasan untuk

tetap logis dalam masa otonomi daerah, bahwa dapat mandiri, maju seiring dengan kabupaten/ kota yang maju di Indonesia dan menjadi Kabupaten andalan di Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi

a. Visi

visi badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, akuntabel dan transparan.

b. Misi

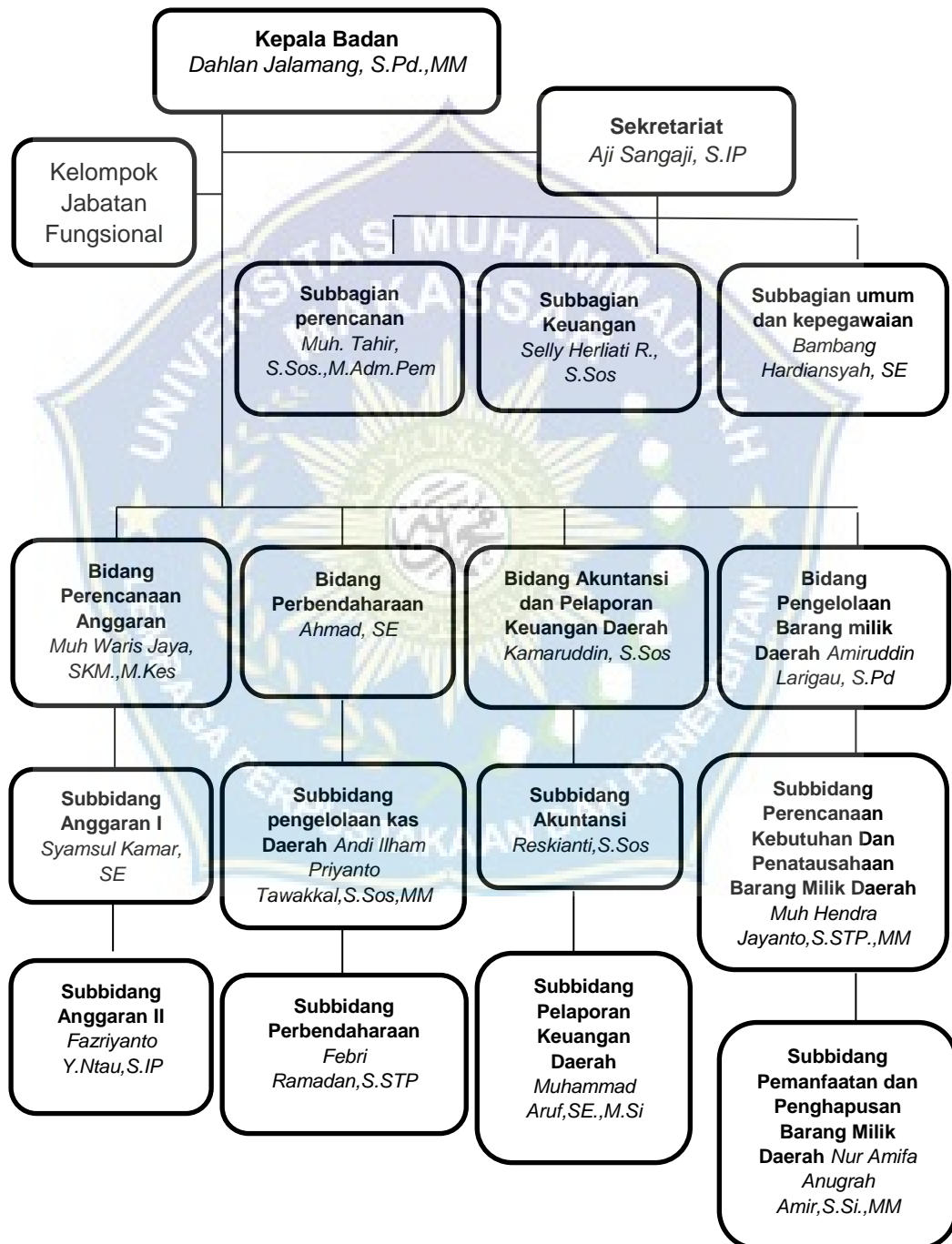
- 1) Memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
- 2) Meningkatkan pengadiln pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh perusahaan yang tertib.
- 3) Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah.
- 4) Memaksimalkan pendapatan daerah melalui dana transfer dan bantuan keuangan.
- 5) Memaksimalkan pengelolaan asset daerah.

3. Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi, instansi maupun perusahaan membutuhkan adanya struktur organisasi yang jelas, nantinya dapat membantu sebuah kegiatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang diinginkan sebelumnya. BKAD di kabupaten Takalar pun memiliki struktur organisasi yang jelas untuk dapat membantu pelaksanaan

dan tujuan kerja dari perusahaan sendiri. Berikut merupakan struktur organisasi dari BKAD.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAKALAR



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) kab. Takalar

4. Uraian Tugas Masing – Masing

1) Kepala Badan

Badan pengelolaan Keuangan Daerah di pimpin oleh seorang kepala badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah.

2) Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretariat yang mempunyai tugas pokok membantu kepala badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan program, kegiatan, anggaran, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan badan.

3) Subbagian Perencanaan

Subbagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretariat dalam mengumpulkan penyusunan perencanaan program kegiatan, anggaran, penyajian, data dan informasi, serta penyusunan laporan.

4) Subbagian Keuangan

Subbagian keuangan di pimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretariat dalam mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

5) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian di pimpin oleh seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu secretariat dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan tentang barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

6) Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang perencanaan anggaran di pimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan, dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan anggaran daerah.

7) Bidang Perbendaharaan

Kepala bidang perbendaharaan di pimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi perbendaharaan.

8) Subbidang Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Subbidang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di pimpin oleh seorang kepala subbidang yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi bina akuntansi pengelolaan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan desa, serta memberti tugas, membimbing, memeriksa, mengecek, dan membuat laporan tugas subbidang penyusunan laporan keuangan.

9) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepala bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas membantu kepala badan melaksanakan usaha di bidang pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah yang tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

10) Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah

Tugas pokok kepala subbidang perencanaan kebutuhan dan penatausahaan barang membantu kepala badan melaksanakan penelitian terhadap rencana barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMMD)

B. Hasil Penelitian

Aplikasi SIPD merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.



Gambar 4.2
Aplikasi sistem informasi pemerintah Daerah

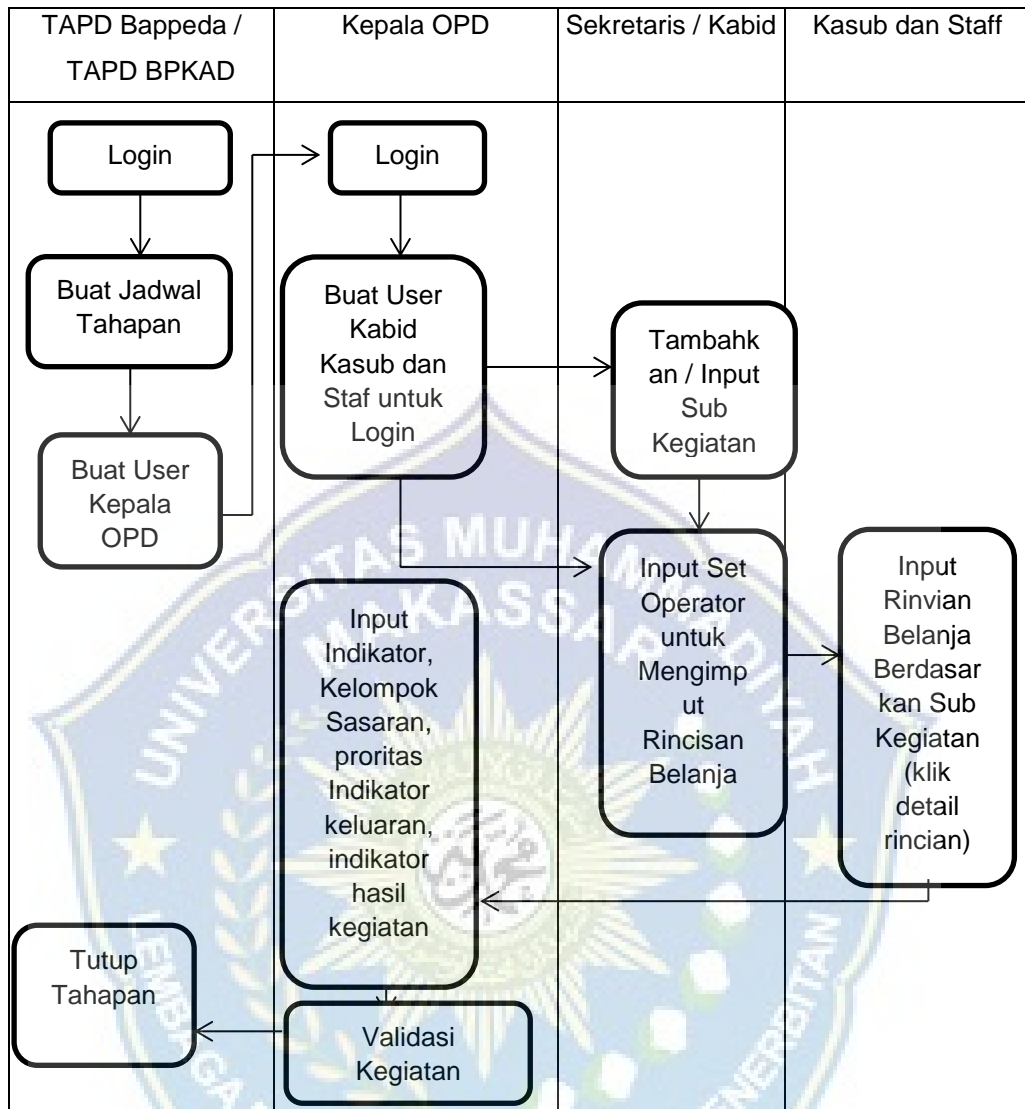
Penyelenggaraan Pemerintah berbasis SPBE terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok.

Aplikasi SIPD mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan stakeholder terkait, lebih khusus lagi dalam SIPD mampu memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (RESTRA PD), dan Rencana kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) sehingga mudah diperoleh analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Informasi mengenai perencanaan pembangunan meliputi kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah.

Aplikasi SIPD mampu mengelola data keuangan daerah melalui stakeholder terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi Perencanaan Anggaran

Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah, Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah, serta Informasi Keuangan Daerah lainnya. Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyimpanan laporan pertanggung jawaban.

★ Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, Peraturan Daerah, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh stakeholder terkait.



Gambar 4.3
gambar Flowchart Aplikasi SIPD

Flowchart ialah salah satu gambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program flowchart juga merupakan salah satu penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan, penanganan suatu informasi atau penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart biasanya mempermudah penyelesaian suatu masalah khususnya masalah yang perlu di pelajari dan di evaluasi lebih lanjut.

Flowchart diasumsikan sebagai salah satu cara sebuah penyajian dari suatu algoritma. Berikut gambar alur input data di sistem SIPD, masing-masing akses user setelah login.

Sebelum menggunakan aplikasi SIPD Badan Keuangan dan Aset Daerah (SIPD) menggunakan aplikasi SIMAKDA. Aplikasi SIMAKDA ini digantikan oleh aplikasi SIPD pada tahun 2019 sampai sekarang. Aplikasi SIPD di *upgrade* menjadi aplikasi SIPD agar fiturnya disempurnakan, dirasa jauh lebih canggih, lebih mudah digunakan, dan menjadi teknologi baru.

Penggunaan aplikasi SIPD dalam membantu penggunaan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan, dijelaskan dalam beberapa bagian yaitu: Kualitas informasi, pengguna dan kepuasan pemakai.

1. Kualitas Informasi

Indikator ini menggambarkan kualitas informasi yang di persepsikan oleh pengguna yang diukur dengan akurasi, ketepatan waktu, dan penyajian informasi.

Peneliti mewawancarai pegawai monitoring aplikasi SIPD, mengatakan bahwa:

“ kualitas informasinya itu sudah cukup lengkap dan data – data yang di input itu sudah benar” (Hasil wawancara dengan Syamsul, Kamis 27 Juli 2023)

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi SIPD sudah cukup lengkap. Hal ini membantu memberikan informasi yang akurat kepada pemangku

kepentingan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak subbidang anggaran yang menggunakan aplikasi SIPD, mengatakan:

“ untuk kualitas informasinya saya rasa sejauh ini sudah baik. Sistem informasi aplikasi SIPD terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal BKAD. (Hasil wawancara dengan SK, Kamis 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa kualitas informasi SIPD sudah baik karena telah terintegrasi dengan sistem internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan penggalan informasi yang peneliti lakukan dimana aplikasi SIPD membantu dalam pengelolaan data yang efisien dan pengambilan keputusan yang akurat.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara tentang indicator kualitas informasi dapat diketahui bahwa kualitas sistem informasi aplikasi SIPD sudah cukup baik dimana data yang diinput sudah benar dan hal ini sangat membantu dalam menginput, dan membantu memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan. Sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Aplikasi SIPD juga terintegrasi dalam sistem internal dan eksternal . hal ini membantu pengelolaan data yang efisien dan dalam pengambilan keputusan yang akurat.

Hasil wawancara diatas sudah sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan menemukan bahwa hal yang dijelaskan di atas sesuai dengan apa yang peneliti amati.

2. Pengguna

Indikator ini diukur dengan indikator yang digunakan yang terdiri dari satu sistem yaitu seberapa sering pengguna menggunakan sistem informasi pemerintah daerah tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Subbidang Anggaran monitoring aplikasi SIPD, mengatakan :

“untuk penggunaannya sangat sering, karena aplikasi ini memang digunakan untuk menginput data anggaran dan data pendapatan”. (Hasil wawancara dengan SK, Kamis 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa aplikasi SIPD sangat sering digunakan dalam menginput data. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan bahwa memang ada pengguna aplikasi sering menggunakannya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak subbidang anggaran yang menggunakan aplikasi SIPD.

“ Saya hampir setiap hari menggunakan aplikasi SIPD yah karena memang saya ditugaskan untuk menginput data – data dengan menggunakan aplikasi SIPD ini jadi untuk seringnya digunakan saya sangat sering menggunakannya”. (Hasil wawancara dengan Syamsul Kamar, Kamis 27 Juli 2023).

Dari wawancara di atas dijelaskan bahwa pengguna aplikasi SIPD hampir setiap hari digunakan untuk melakukan penginputan data. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti menemukan bahwa pegawai yang menggunakan sudah mahir dalam pengoprasian aplikasi.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara yang berkaitan dengan indikator pengguna dapat diketahui bahwa pegawai

menggunakan aplikasi SIPD setiap hari untuk menginput data berarti aplikasi SIPD ini sangat sering digunakan. Hal ini berkaitan dengan siklus keuangan dan sistem informasi pemerintah dimana aplikasi SIPD sering digunakan dalam pengelolaan data karena pengguna dapat dengan mudah melihat dan memahami data yang di hasilkan. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan dimana pengguna aplikasi sudah menguasai aplikasi.

3. Kepuasan Pemakai

Kepuasan pemakai merupakan respon umpan balik yang dimunculkan pengguna setelah memakai sistem informasi pemerintah daerah. Sikap pengguna terhadap sistem informasi pemerintah daerah merupakan kriteria subjektif mengenai seberapa suka atau puas pengguna terhadap sistem yang digunakan.

Peneliti mewawancarai pegawai monitoring aplikasi SIPD mengatakan bahwa:

“untuk kenyamanan dan kepuasan pemakaian aplikasi SIPD belum cukup puas karena aplikasi ini belum mampu untuk membackup data dan terdapat banyak kendala yang dihadapi pada saat pengimputan data dan seringnya terjadi kekecoan seperti pengimputan rincian belanja yang kadang maintenance dan eror” (Hasil wawancara dengan syamsul Kamar, Kamis 27 Juli 2023).

Dari hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa pengguna aplikasi belum cukup puas karena aplikasi ini belum dapat membackup data dan masih sering terdapat banyak kendala yang dihadapi saat penginputan data. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan dimana memang pengguna masih sering terkeco dan merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIPD.

Kemudian kesimpulan dari hasil wawancara dari hasil yang berkaitan dengan indikator kepuasan pemakai dapat diketahui bahwa pemakai masih belum cukup puas karena aplikasi SIPD masih terdapat beberapa fitur yang tidak dapat diakses seperti laporan keuangan terkait realisasi yang sumber dananya sumber dana belanja tidak dapat dibackup oleh aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan menemukan bahwa hal yang dijelaskan di atas sesuai dengan apa yang peneliti amati.

Dari beberapa pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dalam kualitas informasi sudah efektif karena dapat membantu memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dan dalam penggunaan aplikais sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sudah efektif karena aplikasi SIPD sering digunakan untuk melakukan penginputan data. kemudian kepuasan pemakai dalam menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) belum efektif, karena aplikasi SIPD masih sering terdapat banyak kendala yang dihadapi saat penginputan data, dan aplikasi SIPD belum mampu dalam membackup data.

C. Pembahasan

Penggunaan sistem informasi pemerintah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) kabupaten Takalar menggunakan aplikasi SIPD . SIPD adalah sebuah aplikasi yang

digunakan untuk evaluasi perencanaan keuangan, data base pembangunan dan keuangan nasional dan daerah, dan analisa data daerah. Selain itu SIPD juga berperan sebagai perekam transaksi aktivitas belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Aplikasi SIPD melakukan pendampingan secara intensif pada seluruh tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sudah menggunakan satu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terpadu dan terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran/ penetapan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian aplikasi SIPD berperan dalam membantu memastikan ketepatan dalam proses penginputan data, yang merupakan bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah di dalam sistem informasi pemerintah kabupaten Takalar. Penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Pemkab Takalar khususnya BKAD Takalar tentu tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIPD pada BKAD Takalar.

Penerapan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Pemkab Takalar khususnya BKAD Takalar tentu tidak lepas dari prakondisi yang menjadi faktor pendukung yang dimiliki untuk menerapkan SIPD pada BKAD Takalar.

Operator sistem informasi pemerintah (SIPD) sangat berperan penting dalam pengisian data SIPD. Hal ini dikarenakan operator

SIPD yang menjadi tumpuan dalam pelaksanaan program pengisian elemen data yang ada pada SIPD dari tingkat hingga ke pemerintah daerah. Operator SIPD melaksanakan *Traning of rainer* (pelatihan bagi pelatih) atau bimbingan teknis (Bimtek) serta pelatihan keterampilan dengan melakukan 2 metode pendekatan yaitu, mengundang tim pusdatin atau tim kedua Kemendagri untuk melakukan pelatihan dan melakukan *sharing knowledge* oleh tim SIPD daerah Kabupaten Takalar ke masing-masing operator satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Selain itu, perencanaan pengembangan regional membutuhkan keahlian teknis untuk operator SIPD. Untuk memfasilitasi pembuatan dokumen perencanaan pengembangan regional dan memastikan bahwa proses memasukan data ke dalam elemen data SIPD berjalan dengan lancar.

Sarana dan prasarana Kabupaten Takalar umumnya menyediakan pengelolaan SIPD dengan komputer atau labtop dan jaringan internet. Dalam hal sarana dan prasarana untuk penerapan sistem di Kabupaten Takalar sudah tidak menjadi hal masalah dalam proses penyusunan anggaran. Badan Keuangan daerah Kabupaten Takalar, telah menyiapkan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan dalam penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).

Nomor sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) angka menunjukkan nomor sistem informasi. Keluaran SIPD, khususnya berupa dokumen pelaksanaan anggran (DPA) dan rencana kerja

dan anggaran (RKA) dapat digunakan sebagai dasar analisis SIPD. Anggaran kemudian di alokasikan secepat yang diantisipasi setelah proses selesai. Oleh karena itu, pemerintah berharap agar proses pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana untuk memperlancar proses penyaluran anggaran terkait ke seluruh instansi kabupaten Takalar. Kualitas aplikasi SIPD di tentukan oleh kepamahaman, keandalan, keterbandingan, dan relevasinya. Kualitas implementasi kebijakan juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitasnya.

Jika masih terdapat kendala dalam pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), maka penerapan SIPD di kabupaten Takalar akan kurang efektif. Menurut hasil wawancara dari Subbidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar menyatakan bahwa masih seringnya terdapat kendala dalam penerapan SIPD seperti terkendala pada jaringan server yang sering macet membuat proses penginputan menjadi terhambat, kemudian aplikasi SIPD juga belum dapat membackup data dan terdapat banyak kendala yang dihadapi pada saat pengimputan data serta terjadinya kekecoan seperti pengimputan rincian belanja yang kadang maintenance dan eror.

Kualitas informasi dari aplikasi SIPD sudah cukup lengkap. Karena aplikasi ini dapat membantu memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepetingan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sebastian Kera Monteiro *et al.* 2023) yang menyatakan bahwa sistem informasi dari

aplikasi sitem informasi pemerintah daerah (SIPD) sudah di Kabupaten Sikka sudah cukup efektif. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Vitriana *et al.* 2022) yang mengungkapkan bahwa implementasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) belum optimal dan SIPD yang digunakan BPKAD dalam menunjang informasi pengelolaan keuangan daerah belum efektif.

Pegawai atau staf yang menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) belum cukup puas karena aplikasi ini belum dapat membackup data dan masih sering terdapat banyak kendala yang dihadapi saat penginputan data. Hal ini sesuai dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan dimana memang pengguna masih sering merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi SIPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Chandra Pramana *et al.* 2023) yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) belum dapat dikatakan efektif karena masih banyak fitur – fitur yang belum muncul dalam aplikasi SIPD dan aplikasi SIPD masih memiliki kendala dan kelemahan dalam penerapannya. Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Alfani and Nasution 2022) yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD sudah efektif karena pegawai yang menggunakan aplikasi SIPD merasakan pekerjaan lebih mudah dan cepat.

Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggunakan aplikasi SIPD hampir setiap hari untuk menginput

data, pegawai juga sudah mahir dalam menggunakan aplikasi SIPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Dinda Riani *et al.* 2021) yang menunjukkan bahwa aplikasi SIPD sering digunakan oleh karena itu pegawai sudah memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem, pegawai tidak merasa bahwa aplikasi SIPD rumit, pegawai merasa tidak memiliki hambatan waktu dalam mempelajari dan menggunakan SIPD, dan pegawai merasa bahwa SIPD membantu pekerjaan. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Brier, Lia Dwi Jayanti 2020) yang menyatakan bahwa menggunakan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun pertama diterapkannya, yang menjadi hambatan dari efektivitas penggunaan adalah kurangnya pemahaman terhadap aplikasi dan perubahan nomenklatur program kegiatan yang membingungkan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dokumen RKPD.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) dalam kualitas informasi sudah efektif karena dapat membantu memberikan informasi yang akurat kepada pemangku kepentingan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat. Kemudian dalam penggunaan aplikasi SIPD ini sudah efektif karena aplikasi ini sering digunakan untuk melakukan penginputan data, dan untuk kepuasan pemakai aplikasi Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) masih sering terdapat banyak kendala yang dihadapi saat penginputan data dan aplikasi SIPD ini belum mampu membckup data sehingga dikatakan belum efektif.

B. Saran

Pada peneliti – peneliti berikutnya yang memiliki keterkaitan untuk mengadakan penelitian serupa, diharapkan dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan memasukkan variable lain di luar variable penelitian ini, dan bagi pembaca semoga dapat menjadi paduan atau referensi, ilmu serta bermanfaat bagi penyusunan skripsi. Kemudian disampaikan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada pemerintah atau kota lain. Peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penelitian pada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, dari berbagai macam hasil penelitian penerapan itu nantinya agar dapat merepresentasikan penerapan sistem

informasi pemerintah daerah (SIPD) di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai referensi perbaikan untuk update SIPD versi berikutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, Dela, Juliana Nasution. 2022. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(1): 4036–43.
- Asmawiah, Siti Hajar, Hary Sulistiyo. 2022. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2020." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(1): 4150–57.
- Balqis, Nadya, Zuhrizal Fadhly, Mauliyanda Az. 2021. "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 11(1): 146–61.
- Budgeting, On et al. 2019. "analisis kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (sipd) terhadap penyusunan anggaran di kota parepare." 3: 1–8.
- Chandra Pramana, Andy et al. 2023. "Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk."
- Chinda Aqhni Adisi, Abdul Sadad. 2022. "Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 1(3): 150–64.
- Defitri, Siska Yulia. 2018. "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Benefita* 3(1): 64.
- Hadi, Abd., Asrori, Rusman. 2021. CV.Pena Persada *Penelitian Kualitatif*. <http://repository.uinsby.ac.id/id/eprint/167/>.
- Informasi, E-readiness Sistem, Pemerintahan Daerah, Studi Kasus, and Dinas Komunikasi. 2021. "Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer (/ Journals / Jitter) Enter Keywords." : 3–5.
- Kumoro, Gunawan Bayu, Untung Sri Hardjanto, Budi Ispriyarso. 2019. "Implementation of the Role of the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia in Examining the Management and Accountability of State Finances According to Law Number 15 Year 2006." *Diponegoro Law Review* 8(1): 343–59.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. 2020. "Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (Bpk) Sebagai Lembaga Negara Di Bidang Pengawasan Keuangan Negara." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5(1): 78–92.
- Nasution, Muhammad Irfan, Nurwani M.Si. 2021. 9 Jurnal Akuntansi dan Keuangan T.

- Novita, Richa, Reta Adistia Ningsih, Silli Sartika Sari. 2023. "Aktivitas Pengisian Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Sekterariat Daerah Kabupaten Sumenep." 3(4): 545–52.
- Puluala, Muhammad Gustavo. 2021. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Daerah Kota Salatiga)." *Jurnal Sosial Teknologi* 1(1): 1–9. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i1.5>.
- Santriaty, Melinda, Elin Erlina Sasanti, and Widia Astuti. 2023. "Mandiri : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pendahuluan." 2(1).
- Sebastian Kera Monteiro, Gerard et al. 2023. "Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Bidang Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kab.Sikka." *Increate - Inovasi dan Kreasi dalam Teknologi Informasi* 9(1). <http://increate.nusanipa.ac.id/index.php/increate/article/view/45>.
- Sukendra, I Komang, I Kadek Surya Atmaja. 2020. *Journal Academia Instrumen Penelitian*.
- Vitriana, Nidya, Agustiawan Agustiawan, Muhammad Ahyaruddin. 2022. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru." *Digital Business Journal* 1(1): 64.
- Wurara, Citta Nadya Celine, Alfon Kimbal, Neni Kumayas. 2020. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2(5): 1–13.

L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN 1

TRANSKIP WAWANCARA SYAMSUL KAMAR

Peneliti : Apa tujuan dan manfaat sistem informasi pemerintah daerah (SIPD)?

Syamsul Kamar : *Tujuannya itu semua proses pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Kota maupun Provinsi disatukan dalam satu aplikasi dibawa naungan kementerian dalam negeri, kemudian manfaatnya yaitu tidak ada lagi duplikasi penganggaran, penyeragaman proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah, mengoptimalkan kegiatan utama, serta mempermudah pengawasan dan audit. (I Baris 3)*

Peneliti : Apakah terdapat pemberitahuan atau sosialisasi terlebih dahulu mengenai sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) sebelum diterapkan?

Syamsul Kamar : *Ada, aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) itu pertama dimulai dari SIPD go.id sebelum masuk ke aplikasi SIPD merah putih, SIPD go.id itu sudah digunakan sejak tahun 2019 kemudian masuk pada tahun 2020 sampai 2023 itu dalam proses penganggaran APBD kita di arahkan untuk menggunakan aplikasi SIPD merah putih dan itu terdapat peraturan dalam negeri. (I-A Baris 11)*

Peneliti : Menurut bapak apakah SDM yang ada di BKAD Takalar sudah memadai dalam pengoprasian SIPD?

Syamsul Kamar : *Mampu, sebenarnya aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini berbasis website jika dikatakan sumber daya manusia (SDM) mampu atau tidak itu tergantung dengan SDMnya apakah mampu tidak dalam mengoprasikan komputer, kalau sudah mampu otomatis sudah bisa mengoprasikan aplikasi SIPD. (II-A Baris 20)*

Peneliti : Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di BKAD Takalar?

Syamsul Kamar : *Bimtek, sosialisasi, dan prektik langsung.*(II-A Baris 25)

Peneliti : Bagaimana pendapat bapak mengenai penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) apakah bapak setuju dengan kebijakan ini?

Syamsul Kamar : *Setuju tidak setuju, karena kami juga di daerah bisa dikatakan setujunya karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak setujunya itu banyak kendala yang kami hadapi saat proses mengoprasikan aplikasi kemudian tidak adanya bimbingan dari kementerian terkait aplikasi. Banyak kendala yang kami hadapi disaat pengimputan, seperti pada saat pengimputan anggaran dan pengimputan belanja.* (II Baris 30)

Peneliti : Apakah selama pengoprasian aplikasi SIPD pernah terjadi masalah?

Syamsul Kamar : *Sering di aplikasi sistem informasi pemerintah (SIPD) kami mengimput rincian belanja, nah dipenginputan rincian belanja ini terdapat banyak masalah kadang maintenance, kadang eror dan tidak bisa masuk inputan dan itu tidak ada backup dari kementerian. Itu yang menjadi kendala kami.* (II-A Baris 51)

Peneliti : Apakah dalam pelaksanaan SIPD, petunjuk atau prosedur oprasi kerja dapat mudah dimengerti oleh para pegawai?

Syamsul Kamar : *Setiap aplikasi pasti terdapat petunjuk teknis Cuma petunjuk teknisnya itu sebatas pengenalan aplikasi untuk kendala – kendala teknis didalamnya itu tidak ditampilkan dalam petunjuk teknis.*(I-A Baris 60)

Peneliti : Bagaimana kualitas informasi yang dihasilkan dari aplikasi SIPD?

Syamsul Kamar : *kalau untuk kualitas informasi yang dihasilkan lumayan lengkap tapi ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses, misalnya kami diminta laporan keuangan terkait realisasi yang sumber dananya dana belanja itu tidak dapat dibackup oleh aplikasi SIPD makanya kami menggunakan aplikasi pendamping daerah yaitu aplikasi SIMAKDA untuk proses penatausahaan keuangan yang tidak dapat dibackup oleh aplikasi SIPD. (I-A Baris 70)*

Peneliti : Bagaimana dengan kepuasan pegawai dalam penggunaan aplikasi SIPD?

Syamsul Kamar : *pegawai atau staf yang ada di badan keuangan dan asset daerah dan di anggaran yang menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) belum cukup puas karena aplikasi ini belum mampu membackup data dan terdapat banyak kendala yang dihadapi pada saat penginputan data dan seringnya terjadi kekecoan seperti penginputan rincian belanja yang kadang maintenance dan eror. (II-A Baris 79)*

Peneliti : Fasilitas apa saja yang dapat menunjang penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD)

Syamsul Kamar : *Yang utama itu jaringan karena aplikasi SIPD ini berbasis website jadi membutuhkan jaringan yang lebih cepat apalagi misalnya pada saat penginputan APBD digunakan semua user yang ada di Kabupaten Takalar otomatis memerlukan jaringan yang kuat, kemudian labtop yang memadai agar membantu proses penginputan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). (II-A Baris 81)*

LAMPIRAN CODING WAWANCARA

1. Coding indicator

I : Berkomunikasi dengan pendengar

I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar

II : Mempormosikan kanal di media social

II-A : Mengajak pendengar untuk berkontribusi langsung

2. Coding key informan

Nama : Syamsul Kamar

Kode : SK

Jabatan : Subbidang Anggaran I

| Kode | Data Wawancara | Baris | Penulisan |
|------|--|-------|-------------|
| I | Tujuannya itu semua proses pengelolaan keuangan yang ada di Kabupaten Kota maupun Provinsi disatukan dalam satu aplikasi dibawa naungan kementerian dalam negeri, kemudian manfaatnya yaitu tidak ada lagi duplikasi penganggaran, penyeragaman proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah, mengoptimalkan kegiatan utama, serta mempermudah pengawasan dan audit. | 3 | SK/I/1/3 |
| I-A | Ada, aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) itu pertama dimulai dari SIPD go.id sebelum masuk ke aplikasi SIPD merah putih, SIPD go.id itu sudah digunakan sejak tahun 2019 kemudian masuk pada tahun 2020 sampai 2023 itu dalam proses penganggaran APBD kita di arahkan untuk menggunakan aplikasi SIPD merah putih dan itu terdapat peraturan dalam negeri. | 11 | SK/I-A/1/11 |

| | | | |
|------|--|----|--------------|
| II-A | Mampu, sebenarnya aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini berbasis website jika dikatakan sumber daya manusia (SDM) mampu atau tidak itu tergantung dengan SDMnya apakah mampu tidak dalam mengoperasikan komputer, kalau sudah mampu otomatis sudah bisa mengoperasikan aplikasi SIPD. | 20 | SK/II-A/1/20 |
| II-A | Bimtek, sosialisasi, dan prektik langsung. | 25 | SK/II-A/1/25 |
| II | Setuju tidak setuju, karena kami juga di daerah bisa dikatakan setuju karena kebijakan pemerintah pusat yang tidak setuju itu banyak kendala yang kami hadapi saat proses mengoperasikan aplikasi kemudian tidak adanya bimbingan dari kementerian terkait aplikasi. Banyak kendala yang kami hadapi disaat pengimputan, seperti pada saat pengimputan anggaran dan pengimputan belanja. | 30 | SK/II//30 |
| II-A | Sering di aplikasi sistem informasi pemerintah (SIPD) kami mengimput rincian belanja, nah dipenginputan rincian belanja ini terdapat banyak masalah kadang maintenance, kadang eror dan tidak bisa masuk inputan dan itu tidak ada backup dari kementerian. Itu yang menjadi kendala kami. | 51 | SK/II-A/1/51 |
| I-A | Setiap aplikasi pasti terdapat petunjuk teknis Cuma petunjuk teknisnya itu sebatas pengenalan aplikasi untuk kendala – kendala teknis didalamnya itu tidak ditampilkan dalam petunjuk teknis | 60 | SK/I-A/1/60 |
| I-A | kalau untuk kualitas informasi yang dihasilkan lumayan lengkap | 70 | SK/I-A/1/70 |

| | | | |
|------|---|----|--------------|
| | <p>tapi ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses, misalnya kami diminta laporan keuangan terkait realisasi yang sumber dananya dana belanja itu tidak dapat dibackup oleh aplikasi SIPD makanya kami menggunakan aplikasi pendamping daerah yaitu aplikasi SIMAKDA untuk proses penatausahaan keuangan yang tidak dapat dibackup oleh aplikasi SIPD.</p> | | |
| II-A | <p>pegawai atau staf yang ada di badan keuangan dan asset daerah dan di anggaran yang menggunakan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) belum cukup puas karena aplikasi ini belum mampu membackup data dan terdapat banyak kendala yang dihadapi pada saat penginputan data dan seringnya terjadi kekecoan seperti penginputan rincian belanja yang kadang maintenance dan eror</p> | 79 | SK/II-A/1/79 |
| II-A | <p>Yang utama itu jaringan karena aplikasi SIPD ini berbasis website jadi membutuhkan jaringan yang lebih cepat apalagi misalnya pada saat penginputan APBD digunakan semua user yang ada di Kabupaten Takalar otomatis memerlukan jaringan yang kuat, kemudian labtop yang memadai agar membantu proses penginputan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).</p> | 81 | SK/II-A/1/81 |

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Subbidang Anggaran Kabupaten Takalar



Kantor BKAD Kabupaten Takalar

Surat izin meneliti dari PTSP Provinsi Sulawesi Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

| | | |
|----------|--------------------------|----------------|
| Nomor | : 20810/S.01/PTSP/2023 | Kepada Yth. |
| Lampiran | : - | Bupati Takalar |
| Perihal | : <u>Izin penelitian</u> | |

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISUMH Makassar Nomor : 1853/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 04 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| N a m a | : NURUL ANRIANI |
| Nomor Pokok | : 105731119919 |
| Program Studi | : Akuntansi |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (S1) |
| Alamat | : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar |

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Juli s/d 07 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISUMH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Surat Rekomendasi dari Badan Kesbang



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 070/309/BKBP/VII/2023

Berdasarkan Surat Plt. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 20810/S.,01/PTSP/2023 Tanggal. 07 Juli 2023 perihal Izin Pengambilan Izin Penelitian, Maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar pada prinsipnya memberikan persetujuan, dan rekomendasi kepada :

| | |
|----------------------|---|
| Nama | : NURUL ANRIANI |
| Tempat Tanggal Lahir | : Takalar, 22 Maret 2001 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pekerjaan/Lembaga | : Mahasiswa (SI) UNISMUH Makassar |
| Alamat | : Kel. Kalabbirang Kec. Pattalassang Kab. Takalar |
| Tempat Penelitian | : BPKD Kantor Bupati Kab. Takalar |
| Waktu Pelaksanaan | : 07 Juli s/d 07 September 2023 |

Untuk diterbitkan Izin Penelitian/Rekomendasi sesuai dengan Permendagri No. 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas Permendagri No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Takalar, 17 Juli 2023



WILKAWAN. S.Sos.
 Pangkat : Penata Tk. 1
 NIP : 19711231 199503 1 008

Surat izin dari PTSP Kabupaten Takalar

No. SERI 304

PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. (0418) 323291 Kab. Takalar

Takalar, 17 Juli 2023

Kepada
 Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
 Aset Daerah Kab. Takalar

Nomor : 304/IP-DPMPTSP/VII/2023
 Lamp. : -
 Perihal : Izin Penelitian

Di-
 Takalar

Berdasarkan Surat dari Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul Sel Nomor : 20810/S.01/PTSP/2023, Tanggal 07 Juli 2023 perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor 070.309/BKBP/VI/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NURUL ANRIANI
 Tempat Tanggal Lahir : Takalar, 22 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNISMUH Makassar
 Alamat : Bilacaddi Desa/Kel. Kalabbirang
 Kec. Pattallassang Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :


**"ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan : 07 Juli s.d 07 September 2023
 Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan Kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.


Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

Plt. Kepala Dinas,

Andi Rujal Mustamin, MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 197407131992111001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbang Kab. Takalar di Takalar;
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar;
4. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
5. Peringgal.

Surat izin meneliti di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)


PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. Jendral Sudirman No. 26 Takalar
 Telepon No. (0418) 21116, Faksimile No. (0418) – 22054

Takalar, 20 Juli 2023

Kepada
 Yth. Bapak Kepala Universitas
 Muhammadiyah Makassar
 Di.
 Makassar

Nomor : 304/IP-DPMPTSP/VII/2023
 Perihal : Izin Penelitian


Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20810/S.01/PTSP/2023 Tanggal 07 Juli 2023, Perihal Izin Penelitian kepada mahasiswa :

Nama : **NURUL ANRIANI**
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tgl Lahir : Takalar, 22 Maret 2001
 Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswi (S1) UNISMUH Makassar
 Alamat : Bilacaddi Desa/Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR”** yang akan dilaksanakan dari tanggal 07 Juli 2023 s/d 07 September 2023.

Atas Perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala BKAD
 Sekretaris

AJI SANGAJI, S.P.
 Pangkat: Pembina
 NIP. 19880531 200701 1 002

Surat Keterangan Bebas Plagiat



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurul Anriani
Nim : 105731119919
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 1 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 1 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 6 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 1 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 4 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Agustus 2023
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Nurul anriani 105731119919

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|---|--------------|----------------|
| 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |
| PRIMARY SOURCES | | | |
| 1 | eprints.Indriani.ac.id Internal Source | | 1 % |

Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off



BAB II Nurul anriani 105731119919

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|---|--------------|----------------|
| 1 % | 1 % | 0 % | 0 % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |
| PRIMARY SOURCES | | | |
| 1 | 123dok.com Internet Source | | <1 % |
| 2 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | | <1 % |



Exclude quotes Off Exclude matches Off
Exclude bibliography Off

BAB III Nurul anriani 105731119919

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas PGRI Palembang

Student Paper

4%

2

Submitted to Universitas PGRI Madiun

Student Paper

2%

Exclude quotes OnExclude matches < 2%Exclude bibliography On

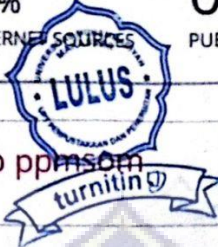
BAB IV Nurul anriani 105731119919

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| 1 % | 0 % | 0 % | 1 % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |
| PRIMARY SOURCES | | | |
| 1 | Submitted to pphmsom Student Paper | | 1 % |
| 2 | core.ac.uk Internet Source | | <1 % |

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches On



BAB V Nurul anriani 105731119919

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|---|--------------|----------------|
| 4% | 4% | 0% | 0% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |
| PRIMARY SOURCES | | | |
| 1 | repository.usd.ac.id Internet Source | | 4% |

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BIOGRAFI PENULIS



NURUL ANRIANI adalah nama penulis skripsi ini. Penulis dilahirkan di Takalar, 22 Maret 2001 dari pasangan Bapak Muh. Yusuf dan Ibu Suriati sebagai anak ke 3 dari 3 bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jl. Chaeruddin Dg Ngampa, Kel. Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kab. Takalar. Penulis menempuh pendidikan pertama dimulai dari SD Negeri 6 Bilacaddi pada Tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan di SMP Negeri 2 Takalar pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 3 Takalar pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.